



**RISALAH
RAPAT KERJA
KOMISI X DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Tahun Sidang	: 2022 - 2023
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 14 Juni 2023
Waktu	: 19.21 WIB s.d. 20.45
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 1. Jl.Jenderal Gatot Subroto - Jakarta.
Ketua Rapat	: AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS., M.M./PDIP : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
Acara	: Membahas Pergeseran Anggaran Kemendikbudristek RI TA 2023.
Hadir	: PIMPINAN : 1. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M. 2. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Putra Nababan
2. H. Arwan M.Aras T., S.Kom.
3. Puti Guntur Sukarno, S.IP.
4. Andreas Hugo Pareira

F-P.GOLKAR :

1. Ferdiansyah, SE., MM.
2. H. Muhammad Nur Purnamasidi
3. Adrian Jopie Paruntu
4. Robert Joppy Kardinal, SAB.

F-P.GERINDRA :

1. Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
2. Ir. H. Nuroji
3. Dr.Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Si.

F-P.NASDEM :

1. Ratih Mega Sari Singkaru, M.Si.
2. Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M.

F-PKB :

1. Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.

f

2. Drs. H. Bisri Romly, M.M.
3. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

F-P.DEMOKRAT :

-

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T.

F-PAN :

1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
2. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.

F-PPP :

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

UNDANGAN :

1. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI RI (NADIEM ANWAR
MAKARIM, B.A., M.B.A.) Beserta Jajaran.



Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT / F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):

Pak Menteri beserta jajarannya komplit ini ya,
Kemudian Pak Dede,
Pak Fikri dan,
Para Anggota Komisi X serta,
Hadirin sekalian,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, kita diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek dalam keadaan sehat *walafiat*.

Menurut laporan Sekretariat, ditandatangani oleh 9 Fraksi, artinya 100% Fraksi hadir. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) peraturan DPR RI tentang tata tertib telah terpenuhi.

Perkenankan kami membuka Rapat Kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.21 WIB)

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Agenda rapat hari ini adalah meneruskan proses pembahasan pergeseran anggaran Kemendikbudristek RI Tahun Anggaran 2021. Apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Sebelum saudara Mendikbud menyampaikan paparannya, dari meja Pimpinan menyampaikan bahwa Rapat Kerja malam ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut:

Tentang MD3 kita memenuhi Pasal 29, Pasal 227, kemudian Pasal 98 huruf A, D dan Pasal 98 ayat (6).

Kemudian, Undang-Undang 28 tentang APBN. Pasal 1 mengenai perubahan anggaran belanja negara, kemudian yang Undang-Undang Nomor 17 adalah Pasal 27 ayat (3) huruf A, B, dan C.

Dengan demikian, landasan hukum di atas menegaskan bahwa perubahan atau pergeseran anggaran yang ada di Mitra Komisi X DPR RI harus mendapatkan persetujuan dari Komisi yang bersangkutan.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Selain landasan hukum sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, secara teknis Komisi X telah melaksanakan RDP tentang pembahasan pergeseran Kemendikbudristek didasarkan pada Surat Menteri tanggal 27 Maret tahun 2023, perihal: Permohonan Persetujuan Revisi Atas Anggaran Antar Program Antar Unit Eselon I yang ditujukan kepada Komisi X.

Kemudian surat tetanggal 16 Desember, perihal penyampaian usulan pendanaan melalui LPDP yang ditujukan kepada Kemenkeu RI, dan surat tertanggal 29 Desember, perihal usulan program melalui mekanisme sumber dana LPDP tahun 2023. Surat-surat tersebut menjadi lampiran dalam keputusan yang akan disampaikan di dalam Rapat Kerja ini.

Kemudian, Rapat Dengar Pendapat dilakukan tanggal 10 April, kemudian tanggal 30 Mei dan hasilnya adalah mendapatkan penjelasan dan paparan mengenai beberapa hal. Pagu indikatif Kemendikbudristek Tahun Anggaran 23 sebesar 80,221 triliun sekian. Kemudian, menyampaikan pagu berjalan 10 April 2023 sebesar 81,102 triliun sekian.

Jumlah tersebut meningkat 881,3 triliun sekian dari pagu definitif. Peningkatan tersebut bersumber kepada luncluran yang ada di Sekretariat Jenderal, kemudian Dirjen Dikti Ristek, kemudian Vokasi, kemudian Vokasi satunya lagi cuma 3 ya, GTK. GTK ya? *Nggak*, ini Ristek, Dikti Ristek semua.

Kemudian bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama. Mohon maaf, ini saya tidak baca angkanya ya supaya *nggak* sama, kan yang lalu sudah terbaca. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama Kemendikbudristek dengan LPDP tentang program pendanaan beasiswa tahun 2023, maka Kemendikbudristek mengusulkan pergeseran anggaran sebesar 1,379 triliun sekian dari kegiatan yang didanai LPDP di unit kerja sebagaimana tabel berikut.

Nah, ini Bapak Ibu pergeserannya. Jumlah anggaran yang dialihkan, ada targetnya. Dipastikan bahwa targetnya tidak ada yang turun, target sasaran manusianya bahkan mungkin bertambah. Hanya beberapa satuan Rupiahnya per orang menjadi berubah. Namun, dipastikan mutu daripada pelaksanaan program-program ini tidak menurun.

Ada empat satuan unit utama yang mengusulkan untuk mengurangi anggarannya, yaitu Sekretaris Jenderal di program beasiswa ADIK, kemudian Dirjen GTK di Pendidikan Profesi Guru, kemudian kampus mengajar, beasiswa KNB, magang dosen sumber daya manusia Dikti di Dirjen Dikti Ristek, dan di



Dirjen Vokasi ada di *upskilling* and *reskilling* dosen vokasi, uji kompetensi profesi mahasiswa vokasi. Mahasiswanya kurang S, Mas ya.

Ini semua sudah dijelaskan secara detail pada saat kita Raker tanggal 10 Mei, eh 30 Mei.

Kemudian anggaran sebesar 1,79 triliun sekian diusulkan untuk menambah program “Indonesia Pintar Khusus Jenjang Sekolah Dasar”. Terhadap penjelasan Pagu Indikatif, definitif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ini, Komisi X memberikan catatan agar masing-masing unit utama menyampaikan penjelasan secara rinci dan tertulis mengenai penambahan anggaran tersebut mulai dari besaran anggaran sampai distribusi dan untuk peruntukannya, serta alasan penentuan jumlahnya sebagai landasan untuk melakukan fungsi pengawasan. Bahan tertulis disampaikan kepada Komisi X pada tanggal 31 Mei yang lalu.

Komisi X juga mendesak untuk menyampaikan pergerakan pagu anggaran Kemendikbud setidaknya per 3 bulan, apabila terjadi perubahan atau penambahan akibat adanya luncturan SBSN, luncturan dan percepatan PHLN, penambahan atau pengurangan PNPB dan BLU yang selanjutnya akan dijadikan landasan Komisi X untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terhadap usulan pergeseran dimaksud dengan angka satu, Komisi X mendesak masing-masing unit utama Setjen, Dirjen GTK, Dikti Ristek dan Diksi agar menyampaikan penjelasan tertulis terkait perubahan anggaran dan sasaran paling lambat tanggal 31 Mei 2023.

Selanjutnya, dapat memahami dan menyetujui pergeseran anggaran dengan rincian per unit utama sebagai berikut. *Nah*, ini yang waktu itu minta diisi oleh Dikbud. *Nah*, hari ini sepertinya TA kita sudah membantu. Nanti dalam proses penetapannya akan kita masukkan angka-angka kita secara bersama-sama.

Yang keenam, dari hasil pembahasan pergeseran tersebut, RDP pada hari ini akan memutuskan ya, akan memutuskan untuk persetujuan.

Kemudian yang ketujuh, Komisi X mendesak Kemendikbudristek agar dalam penyusunan RKA K/L pada setiap tahunnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang tentang APBN dan Perpres yang berisi rincian pagu kementerian dan lembaga. Ini adalah hasil dari lapsing pada periode lalu.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Per tanggal 13 Juni, melalui surat suara kepada Komisi X perihal penjelasan Pagu berjalan dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang didanai melalui LPDP Tahun Anggaran 2023, Kemendikbudristek RI



memberikan penjelasan tertulis mengenai penambahan anggaran sebesar Rp881.346.271.000,- yang dialokasikan pada unit kerja dan surat ini merupakan realisasi dari keputusan angka dua RDP tanggal 30 Mei.

Sedangkan lampiran tersebut, berisi penjelasan mengenai usulan pergeseran dari masing-masing unit utama, beserta perubahan anggaran dan sasaran pada program kegiatan yang dialihkan ke LPDP dengan menyandingkan hasil Raker tanggal 26 September tahun 2022, RDP tanggal 30 Mei 2023 dan lampiran surat tersebut merupakan realisasi dari keputusan angka empat RDP tahun, eh tanggal 30 Mei tahun 2023.

Surat Kemendikbud yang berisi penjelasan terkait tambahan pagu anggaran, pergeseran pada kegiatan yang didanai melalui LPDP dan bahan Raker hari ini, apakah sudah dianggap cukup sebagai materi pembahasan. Jika sudah cukup, maka Rapat Kerja hari ini fokus membahas perubahan anggaran dan sasaran pada program dan kegiatan yang dialihkan dari LPDP sebesar 1,379 untuk selanjutnya mendapatkan keputusan dalam Rapat Kerja.

Demikian pokok-pokok agenda rapat hari ini, sebelum Mendikbud menyampaikan paparan, kita perlu kesepakatan waktu.

Kita akan sampai pukul berapa Bapak Ibu, 20:30? Baik, 20:30.

(RAPAT:SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Kami persilakan kepada Mendikbudristek untuk menyampaikan paparannya.

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI
(NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Terima kasih.

Bapak-Ibu Anggota Komisi X.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan penuh rasa hormat, Ibu Pimpinan. Banyak sekali dalam presentasi kami, di paparan kami, banyak yang sudah sebenarnya tersebut di dalam paparan, Ibu Pimpinan.

Jadi, kami akan mungkin *pressure* fokus kepada penjelasan pergerakannya saja, mungkin halaman itu jadi kuncinya. Untuk itu, saya persilahkan Bu Setjen untuk memaparkan fokus kepada pergeserannya apa saja yang bergeser.

Terima kasih.



**SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI RI (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):**

Terima kasih, Bapak Menteri.

Izinkan,

Ibu Pimpinan Komisi X, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi X yang kami hormati,

Mungkin, karena sudah dipaparkan oleh tadi oleh Bapak Ibu Pimpinan bagaimana pergerakan anggaran dari pagu definitif sampai pagu bulan April. Kami akan langsung ke halaman 11 terkait dengan pengalokasian anggaran yang diarahkan ke LPDP.

Kami dapat laporkan di dalam sidang hari ini, dalam Raker hari ini bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini LPDP, ada sebesar 1,379 triliun Rupiah anggaran di Kemendikbudristek yang pembiayaannya dialihkan oleh LPDP.

Namun demikian, seluruh program tersebut masih tetap menjadi ke pengelolaan di Kemendikbudristek. Kegiatan yang dialihkan ke LPDP adalah pertama beasiswa afirmasi pendidikan tinggi yang ada di Sekjen, kemudian pendidikan profesi guru yang ada di Ditjen GTK, mahasiswa mendapat layanan melaksanakan *camp* MBKM di Ditjen Dikti, beasiswa kemitraan negara berkembang, dan kemudian peningkatan SDM di Ditjen Dikti untuk mengikuti peningkatan mutu dan kompetensi.

Selain itu, ada dua kegiatan vokasi yaitu, SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi, dan mahasiswa pendidikan tinggi yang mengikuti uji kompetensi profesi.

Kemudian dari seluruh anggaran yang dialihkan ke LPDP tersebut, fiskal yang ada di alihkan, diusulkan untuk dialihkan untuk membiayai program Indonesia Pintar khususnya untuk jenjang SD untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang diusulkan dalam pembahasan di pagu definitif tahun 2023 yaitu, sebesar 1,379 triliun Rupiah.

Adapun pergerakan pergeseran anggaran dari masing-masing unit utama dan program tertuang di dalam halaman 12 dan 13. Pertama untuk Sekjen, bergerak dari 34,04 dari posisi 10 April menjadi 35,276 triliun Rupiah, dengan mengalami penambahan sebesar 1,23 triliun Rupiah. Penambahan 1,379 untuk PIP dan pengurangan 145 untuk program ADIK.

Kemudian pergerakan berikutnya terjadi di Ditjen GTK, yang semula Pagu berjalan di bulan April 4,22 triliun Rupiah berkurang 1,011 triliun Rupiah menjadi 3,21 triliun Rupiah.

Adapun Ditjen Perguruan Tinggi mengalami pengurangan dari 30,18 triliun Rupiah berkurang 206 miliar Rupiah menjadi 29,97 triliun Rupiah,



sementara Ditjen Pendidikan Vokasi bergerak dari 6,65 triliun Rupiah berkurang sebesar 16,67 miliar Rupiah menjadi 6,63 triliun Rupiah.

Adapun di halaman 14 kami jelaskan terkait dengan target PIP di jenjang SD. Di Pagu awal kita alokasikan sebesar 2,83 triliun Rupiah, alokasi yang dibutuhkan adalah 4,22 triliun Rupiah, kemudian alokasi setelah revisi disetujui 4,21. Sehingga, dari penambahan 1,379 triliun Rupiah dari kegiatan yang lain, masih ada kekurangan 13 miliar saja yang sudah kita usulkan di biayai dari BA BUN.

Demikian, kami kembalikan ke Bapak Menteri.

Terima kasih.

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI
(NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Iya, demikian.

Bapak-Ibu Pimpinan Komisi X.

Berarti, garis besarnya adalah pergeseran anggaran tersebut itu disebabkan oleh adanya dana dari LPDP, sehingga dana itu bisa direalokasi ke hal-hal yang lain.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila dapat kita simpulkan lebih lanjut bahwa hanya dari empat unit utama yang terjadi pergeseran. Kemudian yang menerima hasil daripada pergeseran itu hanya satu, kemudian yang lainnya tidak mengalami pergeseran.

Baiklah Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan paparan dari Kemendikbudristek, kami persilakan kepada para Anggota Komisi X untuk menyampaikan pendapat.

Tadi sudah ada kesepakatan di antara kita, karena waktu juga karena ini sudah beberapa kali acara rapat, sehingga diputuskan untuk satu Fraksi memberikan tanggapan, se persetujuan satu Fraksi satu orang Anggota.

Kami mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Andreas silakan.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Baik, terima kasih.



Ibu Pimpinan,
Para Pimpinan,
Anggota Komisi X,
Mas Menteri,
Bu Sekjen beserta,
Seluruh staf jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek,

Setelah mendengar penjelasan dari Mas Menteri yang kemudian jelaskan lebih detail lagi oleh Ibu Sekjen, kami benar-benar mengikuti pergerakan angka, angka-angka ini dari satu item ke item yang lain dan pada prinsipnya kami setuju dengan apa yang sudah dijelaskan.

Mungkin catatan kecil yang berkaitan dengan kekurangan itu tadi, kekurangan di bagian akhir itu ada 13, 13 miliar sekian itu dimintakan ke BA BUN itu, apakah sudah disetujui gitu. Sehingga jangan sampai ya permintaan itu kemudian menjadi menjadi catatan kalau sudah disetujui, ya saya kira mungkin langsung ditulis aja bahwa ini sudah disetujui gitu. Sehingga, memang kekurangan itu sudah ditutupi melalui bahasanya gitu, bahasanya kekurangan itu ditutupi melalui BA BUN. Sehingga dengan demikian, *clear* gitu persetujuannya. Dengan demikian kami bisa menyetujui itu.

Itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Menyetujui, ya Pak.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Itu prinsipnya menyetujui itu, tapi dengan catatan tadi yang berkaitan dengan kekurangan itu.

KETUA RAPAT:

Diusulkan, Pak. Tulisannya diusulkan, di situ

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Mohon maaf, koreksi saya tadi yang tadi sudah diberi masukan dari tim bahwa sebenarnya belum disepakati, tapi karena menunggu hasil hari ini. Jadi, baru akan kita ajukan.

KETUA RAPAT:

Banggar, Pak tadi.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Iya, terima kasih.



F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Iya, pada prinsipnya kita menyetujui.

KETUA RAPAT:

Menyetujui.

Baik, terima kasih. Fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya adalah Fraksi Golongan Karya.

Silakan, Pak.

F-P.GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan,
Para Anggota Komisi X,
Saudara Menteri serta,
Seluruh jajarannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan dan,
Sejahtera untuk kita semua,

Yang pertama, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya juga menyetujui. Tapi dengan sejumlah catatan. Catatan yang pertama adalah seyogyanya kejadian seperti ini jangan berulang kali. Artinya, kalau kita cermati yang halaman sembilan Bapak Ibu Anggota dan para Pimpinan. Luncuran-luncuran ini kan selama ini memang tidak pernah dibahas dan tidak pernah terinformasikan. Urutannya kalau kita cermati, saya sedikit agak *flash back* supaya nanti juga jelas dalam kita menentukan atau mengambil keputusan.

Seperti diketahui, kita akan ditetapkan APBN dan berdasarkan Undang-Undang. Kementerian dan lembaga diputuskan pagunya berdasarkan Peraturan Presiden. *Nah* itu yang menjadi dasar, pergeseran ataupun terjadi penambahan pagu, tentu ini harus kita klarifikasi. Apakah nanti ini bertentangan dengan Perpres yang telah menetapkan pagu dari setiap kementerian dan kelembagaan.

Kalau dari paparan dari Saudara Menteri dan Saudara Sekjen, kita senang-senang aja, artinya menyemangati. Tapi, yang kita permasalahan di sini adalah mekanisme. Jangan sampai di kemudian hari ini mekanisme dan prosedur ini kita dipermasalahkan. Artinya apa, kalau ini kita setuju konsekuensi logis sudah dihitung *nggak*, bahwa itu harus mengganti Perpres. Saya *nggak* tahu ini melalui Pimpinan, kan ini pagu berarti kan juga terjadi



perubahan, karena adanya luncuran-luncuran, ada tambah-tambahan. Pagunya kementerian dan lembaga Kemendikbudristek menjadi terjadi perubahan. Itu yang mendasari kita soal mekanisme dan prosedur.

Nah oleh karena itu, yang juga menarik Mas Menteri, ini juga buat pelajaran. Karena sudah jadi APBN, sudah jadi DIPA, seyogyanya ketika terjadi pergeseran, walaupun tadi saya, saya dengar sudah dijelaskan, tapi saya juga ingin klarifikasi kembali. Apakah nanti target-target itu tercapai, tapi biasanya Bu Pimpinan dan para Pimpinan dikurangi juga akhirnya targetnya tercapai juga. Cuma kan fenomena yang buruk, dikasih anggaran berapapun tercapai. Ini kan lucu, sesuatu hal yang aneh, minta tambahan anggaran, anggaran dikurangi tercapai. Ini maksudnya gimana sih, saya juga *nggak* kalau bahasanya Bu Wiljeng ini *nggak* mudeng gitu. Dikurangi tercapai, ditambah tercapai, terus kalau begitu *nggak* usah tambah aja. Kasihan teman-teman Banggar berjuang untuk menyampaikan hal ini. Itu catatan yang kedua.

Catatan yang ketiga, kalau sudah terjadi DIPA tentu seharusnya ini bunyi. Misalnya, bergeser dari Satker A ke Satker B, tadinya peruntukannya untuk apa, menjadi peruntukannya untuk apa. Harus bunyi, *placement*-nya, penempatannya. Saya ulangi, saya cabut kalimatnya; penempatannya harus juga disebutkan untuk apa dialihkan untuk di mana. *Nggak* bisa *sekonyong-sekonyong* begini saja bentuk ininya, bentuk paparannya.

Itu kan menjadi menjadi pertanyaan juga kalau ditanya, misalnya mahasiswa mendapatkan layanan melaksanakan kampus Merdeka Belajar mau kita belajar yang di mana, 49.337. Itu yang di mana saja, misalnya itu. Karena, harus dijawab. *Nggak* itu *nggak* dijawab, kan di sini semuanya jajal. Coba tolong Bu Irjen tanya kanan kiri, bener *nggak* sih kayak gini. Kan DIPA, DIPA-nya sudah ada. Harusnya bisa tergambaran penyampaian-penyampaian ini.

Sehingga, kami Fraksi Partai Golkar mengambil kesimpulan. Ya, silakan aja tapi kami juga tidak tahu, apakah namanya yang rapat Raker ini kita membuat catatan. Artinya kita bisa setuju dengan catatan harus dilengkapi dulu, peralihan DIPA tersebut dari mana menjadi apa dan besarnya seperti apa. Karena, penempatannya kita harus tahu kan, seyogyanya seperti itu. Kalau bahasa kerennya kan ini udah pada satuan tiga, lain kalau bentuknya RAPBN.

Kalau yang kami sampaikan ini salah, tolong dikoreksi. Kami sudah menyampaikan ini, Saudara Menteri. Ketika rapat tertutup, RDP menyampaikan kalau memang kami salah, di mana salahnya, kasih tahu. Sehingga, kita tahu kan gitu.

Jadi, itu yang menjadi catatan-catatan penting bagi kami. Jadi, kami tidak ingin dipermasalahkan soal mekanisme dan prosedur melalui forum Rapat Kerja Komisi X DPR RI malam ini. Supaya nanti di kemudian hari, karena ini juga bentuk sebuah dokumen yang harus kita awasi, karena tadinya tidak masuk dalam Pagu Komisi. Ulangi, tidak masuk dalam Pagu Kementerian dan Lembaga, sekarang masuk dalam Pagu Kementerian dan Lembaga.



Konsekuensi logis ada, yaitu kita sebagai lembaga pengawasan harus juga mengawasi, kan begitu Bu Irjen. Terus gimana kalau kita mengawasinya gimana bentuk mengawasinya? Kalau kita tidak tersampaikan, terinformasikan terjadi perubahan-perubahan seperti itu.

Kan *nggak* mungkin kita mengawasi gelondongan-gelondongan seperti itu. Jadi sekali lagi, saya sebagai Anggota Fraksi Partai Golkar Komisi X menyayangkan keputusan Raker ini. Walaupun kita setuju karena ini untuk masalah umat, tapi mekanisme prosedur nampaknya harus diklarifikasi atau diperbaiki lebih baik untuk ke depan, kalau kita menganggap kita ini Mitra, kecuali bukan Mitra. Silakan direnungkan, kalau ucapan saya salah, tolong dikoreksi, kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau salahnya di mana saya dikasih unjuk, karena saya juga bukan Superman atau orang hebat. Tapi, kami mohon panduan juga.

Ini kan bentuk mitra, kalau eyel-eyelan kan kata Bu Bu Wilejeng hanya apa, berbantah-bantah saja, itu bukan Mitra. Jadi, sangat disayangkan sekali lagi. Mudah-mudahan yang di belakang, baris kedua juga memahami. Ini juga bukan bagian yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara mengemban sebagai pejabat di lingkungan Kemendikbud, supaya nanti menjadi catatan kita bersama.

Terima kasih, Pimpinan dan tentu di sini termasuk yang disampaikan Pak Andreas tadi, ya itu 13 miliar pastikan dulu. Nanti kita ngajuin *nggak* disetujui lagi sama BUN kan malu, udah bikin surat. Jadi, seyogyanya bukan dasarnya keputusan rapat ini soal sumber dana, seharusnya juga sudah dikomunikasikan. Artinya, tinggal bentuk formalitas saja terjadi kekurangan sebesar berapa, 13 miliar 142,470 untuk 58.654, itu *confirm* atau pasti. Jadi ya keputusan pada malam hari ini di forum Raker sudah didapat, dipastikan memang akan dapat. *Nah*, kalau *nggak* kan malu lagi. Raker meminta kepada Saudara Mendikbud Ristek untuk membuat surat, untuk meminta kepada BA BUN, ternyata belum mendapatkan konfirmasi dan juga jadi akhirnya kita malu untuk ini.

Itu saja sekali lagi. Prihatin kami dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke ya, disetujui.

Terima kasih, Kang Ferdi.

Jadi, dengan berbagai macam komunikasi yang dilakukan dan berbagai macam Rapat Kerja, serta RDP yang dilakukan. Akhirnya, berbagai macam materi sudah didapatkan teman-teman TA Komisi X. Tadi mulai sore saya minta untuk membuat draft keputusannya dan harus dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang, eh pembahasan APBN yang untuk tahun 2023 ini sudah kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yang



sebelumnya pada tahun 2020, 2021, 22 selama 3 tahun kita menggunakan Perpu Nomor 1 tahun 2020.

Ya, jadi sekarang ini mekanismenya kembali menggunakan Undang-Undang 17 Tahun 2023. Sehingga, memang agak ribet, kok tidak seperti tahun lalu, karena memang kita menggunakan dasar undang-undang yang berbeda.

Mungkin, Mas Menteri batin. Kok sulit ya, kok *nggak* kayak kemarin. Karena, kemarin kita memberikan proses percepatan untuk penanganan covid-19, semuanya berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk khusus tahun 2023, setelahnya. Itu kita menggunakan undang-undang kembali, tidak lagi berada dalam proses darurat, Undang-Undang 17 Tahun 2023. Sehingga, memang agak detil *pating plekitik* iya. Ya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam prosesnya kelihatan bertele-tele dan apa ya istilahnya apa, Pak Ferdi itu, nyebelin begitu loh. Tapi, mudah-mudahan ini selesai malam ini.

Kemudian kepada Pak Ferdi, mungkin yang untuk kekurangan 13 miliar sekian itu untuk PIP, itu belum ada. Jadi, tidak bisa disahkan di sini. Hanya memberitahukan kepada kita bahwa kita sedang berusaha, Kemendikbud sedang berusaha kepada BA BUN, supaya 58.000 siswa sekian yang sudah masuk dalam daftar perencanaan untuk mendapatkan PIP itu ada uangnya, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi, tidak bisa kita.

F-P.GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Makanya boleh kami interupsi.

Terkait hal tersebut, makanya tadi saya ulangi Bu ucapan saya. Saya setuju yang disampaikan, Ibu Pimpinan tidak diputuskan. Silakan menteri mengajukan untuk menutupi kekurangan menutupi 13.000, 13 miliar sekian itu.

Tapi kalau kita menyuruh, itu kita belum dapat konfirmasi, kita malu sebagai lembaga tinggi negara kalau kita putuskan untuk, karena belum dapat konfirmasi. Kita menyuruh, ternyata *nggak* dapat konfirmasi. Waduh, malu Bu lembaga. Sebaiknya, kita pun menyuruh, tapi menyuruh untuk mengajukan, tapi tidak konteks silakan saja untuk menjalani. Tapi, kalau sudah disetujui, Mendikbud Ristek itu melaporkan kembali kepada Komisi X.

Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT:

Jadi, cukup *clear* ya. Kita tidak mengambil keputusan untuk penambahan itu ya, Pak ya, Pak Ferdi?



F-P.GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Sekali lagi walaupun diyakini, konfirmasi masuk dalam catat, masuk dalam lapsing *nggak*, masuk dalam lapsing *nggak*?

KETUA RAPAT:

Tidak, tidak.

F-P.GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Saya ulangi, Mendikbud Ristek Dik, Mendikbud Ristek yakin akan dapat dari BA BUN masukin. Tapi kesimpulannya, kita masukin kesimpulan, *nggak* apa-apa.

KETUA RAPAT:

Mungkin tulisannya, dimintakan usulan kok, Pak. Saya kira *nggak*.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Bu, Bu, Bu Ketua.

Mungkin, kita minta penjelasan dari Bu Sekjen atau Mas Menteri, bahwa itu sedang dalam proses pengusulan, sedang dalam proses pengusulan. Apakah proses pengusulan itu minta konfirmasi dalam rapat malam ini?

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Tidak.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Mungkin berubah ini aja, berubah.

KETUA RAPAT:

Saya mohon maaf, Pak Andreas.

Jadi, agenda kita hari ini adalah untuk persetujuan tentang pergeseran saja dan tadi sudah digedok kan bahwa agenda kita hanya untuk pergeseran. Sedangkan, kita mendapatkan informasi dari Kementerian bahwa ini akan ada tambahan, itu adalah tambahan.

Makasih, Pak Ferdi.

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra.

Silakan Pak.



F-P.GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan,
Seluruh Anggota,
Saudara Menteri serta,
Jajaran yang berbahagia,

Seperti yang kita maklumi, anggaran Kementerian ini sangat besar. Kita semua tahu dengan menggunakan yang sudah disepakati dalam konsinyering. *Nah*, yang perlu kami tegaskan lagi tentang pengawasannya.

Dari sini kita ikhlas, kementeriannya, menteriya ikhlas melaksanakan tapi di bawahnya itu jangan sampai mengkerucut, makin kecil makin kecil ke bawah. Ini yang perlu dikontrol.

Apa yang dicita-citakan oleh kita dan kementerian di pusat ini begitu jugalah hendaknya sampai di daerah. *Nah*, kita tidaklah rahasia lagi anggaran-anggaran banyak itu makin sedikit sampai ke daerahnya, karena banyak sekali semut-semut yang ikut menikmati itu. Ini yang perlu kita sayangkan dananya besar, hendaknya juga program yang diharapkan itu bisa tercapai.

Oleh karena itu semua, kerja keras kita semua masing-masing Dirjen-Dirjen kita banyak di sini masing-masing mengontrol ini. Ya jangan sampai yang penting dana terserap, hasil bukan urusan gua, itu tidak boleh terjadi di mitra kita seluruhnya.

Ini yang ingin catatan yang disampaikan. Dengan usulan pergeseran ini, dari Fraksi Partai Gerinda menyatakan setuju untuk pergeseran.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof.

Setuju ya, Prof. Partai Gerindra selesai, kemudian Partai Nasdem.

Silakan.

F-P.NASDEM (Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M.):

Makasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



Selamat malam,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan Komisi X beserta,
Anggota Komisi X,
Yang terhormat Mas Menteri, beserta jajarannya,

Setelah mendengar apa yang disampaikan Mas Menteri tadi, maka kami dari Fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan sebagai berikut.

Yang pertama, Kemendikbud sebagai induk pengelolaan pendidikan di Indonesia agar mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan sektor peningkatan sumber daya manusia Indonesia, mampu mengatasi setiap persoalan pendidikan, sehingga terwujud masyarakat sejahtera melalui pendidikan yang berkualitas.

Yang kedua, terkait pergeseran anggaran sebesar 1,379 kurang lebih triliun dari kegiatan yang didanai melalui LPDP, untuk mengembalikan anggaran PIP jenjang SD, kami Fraksi Nasdem mengapresiasi usulan tersebut untuk digunakan bagi pembiayaan PIP jenjang SD sebanyak 10,3 juta siswa.

Yang ketiga, terkait beberapa program yang menjadi kolaborasi pembiayaan antara Kemendikbudristek dan LPDP, bagaimanapun skemanya kami Fraksis, Fraksi Fraksi Nasdem hanya berharap bahwa secara administratif dan pencairan dana tidak akan ada kendala, apalagi kekeliruan yang sampai merugikan sasaran penerima.

Yang keempat, terima kasih sekali dengan adanya ruang fiskal yang tercipta oleh kolaborasi ini. Kemudian memberikan tambahan dana untuk penambahan sasaran PIP yang akan sangat bermanfaat dan sangat membantu para siswa di berbagai daerah.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Fraksi Partai Nasdem menyetujui pergeseran.

Selanjutnya, silakan Fraksi PKB, silakan Mas Dafi.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta,
Seluruh Anggota Komisi X,
Yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajaran,



Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada prinsipnya menyetujui pergeseran anggaran, karena memang ini adalah hajat dari anak bangsa. Diketahui bersama memang ya PIP ini menjadi harapan masyarakat ditunggu-tunggu. Kita pun ke Dapil banyak sekali masyarakat yang mengucapkan terima kasih dari program tersebut.

Oleh karena itu, Mas Menteri juga harus memperjuangkan untuk penambahan untuk tahun depan, ini berkenaan dengan program PIP, karena setiap tahunnya memang ada peningkatan calon siswa-siswa baru itu setiap tahunnya di 3-4 persen dan sudah 7 tahun dengan tahun ini PIP itu *nggak* pernah bertambah jumlah penerimanya. *Nah*, ini menjadi catatan.

Nah kemudian juga, di luar konteks ini pada prinsipnya kami telah menyetujui. Di luar konteks ini memang saya berpesan kepada Mas Menteri yang sekarang lebih giat dalam mendorong postur anggaran itu biar udah fokus ferm, gitu loh Mas Menteri. Jangan sampai kita berharap apa tambahan-tambahan yang memang agak-agak sedikit mengkhawatirkan dan juga takut juga gitu.

Misalnya bahwa tiba-tiba kita udah segini aja kita terima. Kita berjuang dulu, kalau bisa anggaran itu bisa kita dapatkan peningkatan sesuai dengan harapan dan capaian ke depan PN3 tentang ini, sumber daya manusia berdaya saing dan juga berkualitas. Tentunya Indonesia harus mempersiapkan dengan matang.

Saya melihat anggaran pendidikan ini, Bu Agustin untuk tahun depan diproyeksikan sekitar 640-690 triliun. *Nah*, ini Kemendikbud baru naiknya sedikit sekali masih, Mas Menteri. Jadi, kalau dipersentase itu angkanya turun gitu, secara persentase dengan peningkatan jumlah fungsi pendidikan. *Nah*, ini menjadi PR besar nanti Mas Menteri untuk bisa meyakinkan.

Dan tadi *alhamdulillah*, rapat tadi diputuskan berkenaan dengan pengelolaan fungsi pendidikan ini menjadi catatan penting yang nanti akan dibicarakan ulang. Jadi, mudah-mudahan ini bisa kita dorong dan juga bisa ada harapan baru, bagaimana proses pendidikan kita semakin baik, dipercaya, dan juga berkualitas.

Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan secepatnya dan juga segala persyaratan-persyaratan lainnya bisa terselesaikan dalam waktu yang singkat dan cepat.

Terima kasih. Saya akhiri.

*Wallahul muwafiq ila wamintariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mas Kadafi.



Sekalian daripada lupa, nanti kalau pada saat rapat dengan anggaran, dengan ID Badan Anggaran, proses perjuangan untuk pendanaan pendidikan ini sudah ada peraturan pemerintah baru Mas, Nomor 18 Tahun 2022. Itu perubahan PP Nomor 48 Tahun 2008. Di situ dapat dilihat betapa peran Kementerian Pendidikan sebenarnya harus mendapatkan porsi pendanaan yang luar biasa besar dan sepertinya dirilisnya Kantor Kepresidenan itu, ada pasal yang menyatakan pendidikan kedinasan tidak boleh dimasukkan dalam komponen dana pendidikan. Jika proyeksi kita 640-690 triliun dengan kewenangan yang didapatkan dari PP itu, seharusnya Kemendikbud dan Kemenag mendapatkan pengelolaan dana yang lebih besar.

Nah, itu seperti ya teman-teman Banggar harus *fight* di samping Mas Menteri juga kepada Kementerian Keuangan harus bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih maksimal begitu. Supaya upaya kita bersama antara Komisi X dengan Kemendikbud dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 tentang pendidikan ini berhasil baik.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa setuju ya tadi. Fraksi Partai Demokrat. Pak Dede, *monggo*.

F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi X):

Baik, terima kasih.

Ibu Pimpinan,
Saudara Menteri yang saya hormati,
Bu Sekjenbeserta,
Seluruh jajaran Eselon I, Eselon II,
Bapak Ibu sekalian,
Teman-teman Komisi X,

Mencermati ini adalah kali ketiganya kita rapat pembahasan pergeseran 1,3 triliun atau 1 triliun 397 miliar tersebut, yang sebetulnya pada dasarnya memang sangat dibutuhkan, tetapi karena ada faktor tadi pergeseran atau perubahan Undang-Undang dari Perpu yang sebelumnya Covid, kembali kepada Undang-Undang Keuangan. Maka, kelihatannya seperti *mbulat*, padahal pada dasarnya kita hanya menjaga agar prosesnya baik, hasilnya pun juga baik.

Oleh karena itu, *alhamdulillah* hari ini kita sudah berkumpul bersama dan sudah menyepakati bahwa pergeseran 1,39 triliun itu pada dasarnya adalah karena ada dukungan dari LPDP kepada pembiayaan yang lainnya, sehingga ini digeser. Jadi, bukan karena faktor kepentingan-kepentingan lainnya, tetapi digeser untuk hal yang *urgent* dan kebetulan paling *urgent* saat ini adalah beasiswa PIP untuk SD. Karena jumlah siswa SD kita memang setiap tahun meningkat seiring dengan kurang lebih 5 juta kelahiran per tahunnya.

Oleh karena itu setelah mencermati hal ini, kalau anggaran ini memang dialihkan untuk beasiswa, masyarakat kita terutama adek-adek SD, yang bahkan Mas Menteri ada PR tambahan nanti buat ke depan. Kita lihat ada



beberapa siswa-siswa SD yang harus menggunakan *styrofoam* menyeberang sungai, nanti kedepan ini pasti kita harus mendukung bagaimana anggaran infrastruktur sekolah itu harus kita perhatikan benar-benar.

Jadi, kami sangat mendukung kembali bahwa Fraksi Partai Demokrat setelah meneliti kebutuhannya ini adalah untuk PIP SD, maka kami menyepakati dan menyetujui perubahan anggaran 1,39 triliun diarahkan untuk PIP SD. Semoga anak-anak SD kita bisa mendapatkan manfaatnya terutama bagi mereka yang sangat berkebutuhan.

Demikian Ibu Ketua, kami kembalikan kepada Ibu Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dede.

Jadi, kita tidak melakukan pengurangan terhadap program yang sudah kita putuskan dan kita sepakati pada tahun 2023 ini. Hanya melakukan pengalihan pembiayaan dan ketika ada sisa kita berikan itu untuk men-*support* program Indonesia Pintar, artinya beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu ya, Pak Dede.

Demikian, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Fraksi PKS.

Silakan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan,
Anggota Komisi X,
Mas Menteri beserta seluruh jajaran,

Alhamdulillah, penjelasan tadi mengingatkan kita bahwa ketika kita merencanakan sebuah program tentu harus mengingat pada pada akar tugasnya.

Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Agustin terkait dengan perubahan PP 48 2008 itu, seharusnya bahkan dipahaminya bukan oleh kita saja melainkan justru oleh pengampuh, pengalokasi, perencana, pembangunan nasional dan juga Kementerian Keuangan. Karena ada banyak hal yang menyebabkan kita kemudian terpaksa harus melakukan perubahan-perubahan dari target yang sudah ditetapkan.



Kami memandang bahwa sebetulnya ketika kemudian ada perubahan sumber pembiayaan dari pihak murni ke LPDP menjadi bagian yang terpaksa dilakukan. Karena memang tidak memungkinkan menggunakan apa namanya, sumber rupiah murni, karena juga harus mengejar target yang harus dicapai terutama dalam hal ini di program PIP untuk SD.

Hanya kami memberikan catatan bahwa ketika kemudian dialihkan sumber pembiayaannya melalui LPDP, perlu dipastikan keberlangsungannya bisa berjalan dengan baik dan tepat sebagaimana diharapkan dalam pencapaian targetnya.

Dengan memandang hal-hal tersebut tadi, Fraksi PKS menganggap bahwa kita perlu memberikan persetujuan terhadap pengalihan sumber pembiayaan dari kepada, dari pembiayaan program ke LPDP untuk kemudian dialihkan kepada program PIP untuk tingkat SD, jenjang SD. Dengan berharap bahwa ini nanti bisa akan memastikan ketercapaian wajib belajar 12 tahun kita tadi tidak putus.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional.

Silakan.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Terima kasih, Saudaraku Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Saudaraku Menteri beserta,
Seluruh jajarannya,

Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional, sudah mengikuti seluruh rangkaian rapat-rapat yang dilakukan dan untuk menelaah anggaran yang disampaikan dan pada hari ini, kami juga sudah melihat bahwa ada usulan untuk melakukan penggeseran, pergeseran dan pergeseran ini untuk digunakan sebagai anggaran PIP jenjang SD dan menurut kami ini sangat tepat.

Karena PIP bagi SD terutama di daerah-daerah Bengkulu dan semuanya di dapil-dapil, saya rasa *nggak* ada yang menyangkal sangat dibutuhkan.



Bayangkanlah saudaraku menteri, dengan uang 450.000 anak-anak kita jadi bisa bersekolah, mendapatkan sepatu, mendapatkan baju, juga bisa mendapatkan buku-buku yang dibutuhkan dan itu nyata sudah dirasakan.

Karena itu, kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengharapkan ridho dari Allah *subhanahu wa ta'ala* menyetujui pergeseran anggaran sebesar 1.379.969.780.000 dari kegiatan yang didanai melalui LPDP untuk mengembalikan anggaran PIP jenjang SD. Semoga pergeseran ini lancar.

*Bilahaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Silakan.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Komisi X,
Mas Menteri,
Bu Sekjen, beserta
Seluruh jajaran,

Ini pembahasannya terlama kayaknya sampai tiga kali rapat, dari konsinyering, Raker dan hari ini kembali kita Rapat Kerja untuk memutuskan hal ini.

Tentu kami dari Fraksi PPP mengapresiasi program PIP yang selama ini secara kemitraan sangat memberikan dampak manfaat kepada masyarakat dan program ini betul-betul sangat dibutuhkan. Sebetulnya jumlah yang kita salurkan itu masih cukup kecil dibanding kebutuhan dari masyarakat yang ada.

Dan kemudian juga, tentu pergeseran yang diajukan dari melalui dana LPDP ini, untuk bagaimana target PIP di jenjang SD ini betul-betul bisa memberikan dampak manfaat yang luas bagi kemaslahatan masyarakat terutama anak-anak SD kita. Walaupun banyak sekali baik secara infrastruktur ya, sekolah, kemudian *mobiler* yang ada di daerah-daerah itu, banyak sekali yang sudah hancur, tapi memang karena keterbatasan anggaran yang ada, mungkin PIP ini adalah bisa mengobati sedikit dari apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita.



Terima kasih, kami dari Fraksi PPP menyepakati, menyetujui. Dengan mengucapkan, “*bismillahirrahmanirrahim*” mudah-mudahan Ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas dan apa yang telah kita sepakati ini benar-benar bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya.

*Wafamiqum wasarfirullah wasalmaqum,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan selesainya 9 Fraksi menyatakan persetujuan dan beberapa tambahan masukan, catatan, informasi dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari keputusan kita.

Maka, pergeseran anggaran yang di mohonkan oleh menteri kepada Komisi X, apakah dapat disetujui? Setuju ya, teman-teman. Setuju, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Baik, kami persilakan kepada saudara Mendikbud Ristek untuk menyampaikan tanggapan atas persetujuan ini sebelum kita membuat keputusan kesimpulan rapat.

Dipersilakan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Makasih.

Saya hanya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Anggota Komisi X untuk persetujuan pergeseran anggaran ini. Semoga juga peningkatan PIP untuk para SD bisa dinikmati oleh masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan tambahan.

Terima kasih.

Demikian dari kami, kembalikan ke meja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, pada Mendikbud yang telah menyampaikan tanggapannya.

Sebelum kami menutup, maka izinkan Pimpinan menyampaikan beberapa konsep keputusan yang akan terdiri dari tiga hal. Ini sudah dibantu sama teman-teman TA untuk mempersiapkannya terlebih dahulu.



Yang pertama adalah persetujuan mengenai pergeseran jumlah pagu untuk empat unit utama, sudah ya jadi ya, ntar dulu, belum ya.

Menyetujui pergeseran anggaran untuk APBN tahun anggaran 2023 sebesar 1,379 triliun sekian dengan rincian. Ini mudah-mudahan angkanya tepat ya Bapak Ibu.

Jadi, hanya empat unit utama ya. Walaupun di bahan itu ada beberapa yang berubah, tapi kita persetujuannya hanya empat unit utama ya, karena di bahan yang lalu kan ini ada banyak perubahan. Ini karena ini adalah bagian dari proses kita, maka apapun kita tetap memunculkan dan pembahasannya hanya disetujui untuk di empat unit utama.

Yang pertama di Sekretariat Jenderal dari 34 menjadi 35, kemudian di Ditjen GTK ya, kemudian Dikti Ristek dan Ditjen Vokasi. Selebihnya yang lainnya, ini tidak mengalami perubahan. Ada koreksi Bu yang pertama, belum ya.

Sambil dilihat yang B saya bacakan. Pergeseran dalam huruf A, terdapat pergeseran sebagaimana huruf A, terdapat pergeseran para program di empat unit utama dengan rincian anggaran sebagai berikut. Itu ada 4.

Kemudian, di Sekjen ada 145 triliun, di Ditjen GTK berkurang 1,0 triliun sekian ya. Oh, aku harus membacakan ya.

Program pendidikan tinggi di Sekretariat Jenderal berkurang sebesar Rp145.200.850.000, sehingga pagu anggaran Sekretariat Jenderal menjadi Rp35.276.916.905.000. Saya kira ini sudah terpagu, karena anu *copy paste* dari data dari Kemendikbud.

Kemudian yang kedua, program kualitas pengajaran dan pembelajaran di Dirjen GTK berkurang sebesar Rp1.011.500.000.000, sehingga pagu Dirjen GTK berubah menjadi 3.211.683.362 triliun Rupiah, betul ya Prof.

Kemudian, menjadi. Mana ini yang Diktinya, kok halamannya hilang yang Dikti. Sebentar ya, sebentar ada satu lembar yang.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Nomor 3 itu.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Ada di layar, Bu itu.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf ya, oke dibaca di layar ya.



Program Pendidikan Tinggi di Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek, berkurang Rp206.594.200.000, sehingga Pagu Ditjen Dikti berubah menjadi Rp29.974.890.837.000.

Kemudian, pendidikan Vokasi di Dirjen Pendidikan Vokasi berkurang Rp16.675.000.000,00 sehingga Pagu Ditjen Diksi menjadi Rp6.633.360.079.000.

Dengan demikian, total dari keempat program pada unit utama tersebut adalah sebesar Rp1.379.969.780.000, dialihkan untuk membiayai program PAUD dan wajib belajar 12 tahun atau PIP jenjang SD di Sekretariat Jenderal.

Komisi X DPR RI memahami bahwa program dan kegiatan yang berkurang anggarannya di keempat unit utama tersebut, pembiayaannya akan menggunakan dana kolaborasi dengan LPDP.

Mungkin harus ditambahkan, Mas. Sehingga, target dan programnya tidak berubah, hanya pembiayaannya saja yang berubah. Ya, sesuai target, 4 unit utama tersebut sasarannya sesuai target yang telah ditetapkan pada penetapan APBN tahun 2000, untuk APBN tahun 2023, tetapi pembiayaannya akan menggunakan dana kolaborasi dengan LPDP.

Itu ya yang ditetapkan sebelumnya, ditetapkan yang ditetapkan, yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2023, bukan sebelumnya *nggak* usah, Mas. Yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2023 tidak berubah, ya tidak berubah koma, pembiayaannya merupakan kolaborasi dengan LPDP. pembiayaannya menggunakan dana kolaborasi ya, oh udah di atas.

Komisi X, X-nya angka romawinya belum ada. Memahami bahwa program dan kegiatan yang berkurang pada anggaran di keempat unit utama tersebut, sudah dibalik berarti. Sasaran dan sasarannya sesuai target yang telah ditetapkan, pembiayaannya dirubah.

Hallo. Sasarannya disebut duluan yang tidak berubah, pembiayaannya.

Oke, saya ulangi ya, Komisi X DPR RI memahami bahwa program dan kegiatan, sasaran program dan kegiatan ini, Mbak. Bahwa sasaran koma, target ya mungkin. Sasaran itu sama target apanya? Ya berarti kata-kata targetnya tidak usah.

Bahwa sasaran program dan program kegiatan, tidak berubah, *nah*. Bahwa sasaran program dan program kegiatan, tidak berubah, karena pembiayaannya menggunakan. Kata akannya *nggak* usah, karena sudah pasti ini, bukan perencanaan. Karena, pembiayaannya menggunakan. Ya, akannya hilang, menggunakan dana kolaborasi dengan LPDP titik.

Komisi X memahami bahwa sasaran program dan kegiatan tidak berubah di keempat unit utama tersebut, karena pembiayaannya menggunakan dana kolaborasi dengan LPDP. Oke ya.



Kemudian yang D, Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek sepakat bahwa unit utama yang mengalami pergeseran dan tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut.

Bukan ini di depan tadi Mas, sudah Mas. Oh, ya ya ya. Oh, gitu ya. Oke deh.

Kita masukkan ya bahwa Sekretariat Jenderal berubah, Inspektorat Jenderal tidak berubah. Dirjen PAUD Dikdasmen tidak berubah, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tidak berubah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak berubah, Dirjen Kebudayaan tidak berubah, Dirjen GTK berubah, Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi berubah, Ditjen Vokasi berubah.

Terhadap pergeseran diusulkan Kemendikbudristek RI, Komisi X DPR RI menegaskan agar memastikan bahwa perubahan atau pergeseran program dan kegiatan dikeempat unit utama sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan memiliki landasan hukum yang kuat dan menyampaikan rincian program kegiatan secara rinci dengan melampirkan DIPA atau anggaran 2023 dan menyampaikannya kepada Komisi X paling lambat pada, kapan ini, kira-kira?

Tapi sebelum saya bertanya tentang waktu, setelah membaca proses kesimpulan ini. Apakah ada tanggapan?

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Ada koreksi. Izin, Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Di dalam tabel yang ada angka-angkanya, di situ disebutkan di Sekjen empat kolom itu, tetapi kolom yang terakhir 35,276 triliun itu sudah dengan penambahan 1,37 triliun untuk PIP.

Dengan demikian kami usul, di antara dua kolom tersebut di langsung dimasukkan satu kolom tambahan, anggaran, pengalihan anggaran.

KETUA RAPAT:

Iya, betul ini.



SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Jadi penambahan satu.

KETUA RAPAT:

Betul ini.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Jadi, satu kolom ditambahkan setelah kolom anggaran.

KETUA RAPAT:

Iya, di Sekretariat Jenderal itu harus ada tambahan satu. Satu, Mas. Jadi, yang dialihkan melalui kolaborasi dan menerima, dia menerima nih, Sekretaris Jenderal ini menerima 1,3.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Itu tidak apa-apa tetap angka positif, karena konteksnya yang dialihkan, tetapi tambah satu kolom, *insert*. Bukan satu baris, Mas satu kolom. Karena, judulnya di kolomnya anggaran yang dialihkan melalui kolaborasi LPDP.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan 1,379 di situ harusnya di kolom itu.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Iya, kolom Mas bukan baris. Kolom baru, kolom baru dengan judul.

KETUA RAPAT:

Tambah kolom, tambah kolom.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Insert kolom.

KETUA RAPAT:

Pengalihan. Kalau tidak mau begitu, berarti ada dua tabel. Yang tabel pertama, alokasi setelah disetujui. Oh, ya *nggak* perlu juga nanti malah nambah-nambahi tambah lebar. Iya, ditambah kolom.



SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Mungkin, kolomnya yang sebelah kanan kebalik.

KETUA RAPAT:

Kalau anggarannya kebalikan ini, ini mepet ke pagu anggaran, ya kemudian kolom itu isinya hanya satu untuk khusus Sekretariat Jenderal mendapatkan tambahan. *Nah*, gitu.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Insert, coba diklik kanan.

KETUA RAPAT:

Gimana-gimana maksudmu.

Coba ini biar diselesaikan dulu konsepnya TA. Kalau begitu dikasih keterangan apa, penambahan. Kalau begitu yang 145 dan yang lainnya kamu kasih minus, yang itu plus ya.

Terus, alokasi yang direvisi disetujui hanya 135, itu posisinya berada di satu baris yang sama dengan 1,379. Kalau *nggak* mau nambah kolom.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Sambil menunggu tabel diperbaiki, Bu.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Ibu.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Yang B pertama, itu sama mengikuti. Jadi, yang ada di Dikti Program Pendidikan Tinggi Sekretariat Jendral berkurang sebesar 145 miliar sekian.

KETUA RAPAT:

Dan bertambah begitu ya.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Dan bertambah, langsung di situ barang kali.



KETUA RAPAT:

Iya.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Sehingga, kelompok 4-5 baris setelah poin empat tidak diperlukan.

KETUA RAPAT:

Iya, itu kalau mau gitu. Gitu, Bu? Jadi, yang lainnya di minus. *Nah* itu, itunya jadi satu, satu baris yang sama. *Nggak* usah pakai garis kayaknya. Saya supaya kelihatan itu berada dalam satu unit utama yang sama ya, ya plus dan minus ya.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Berarti judul kolomnya berubah ya, Bu. Karena judul kolomnya di situ anggaran yang dialihkan melalui kolaborasi LPDP.

KETUA RAPAT:

Perubahan berarti.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Perubahan saja, Bu.

KETUA RAPAT:

Perubahan ya. Sudah belum? Ya, itu yang di dalam situ garisnya dihilangin semua, karena dia di dalam satu unit utama, hemat semua, ya.

Nah terus judulnya, Mbak judul kolom. Anggaran yang dialihkan melalui kolaborasi LPDP itu disebut perubahan, perubahan. *Nah* oke begitu saja cukup. Ke tengah ke Mbak, di tengahkan. Kata perubahannya itu dibawa ke tengah, *nah* udah.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Berarti kolom, baris terakhir angkanya tidak jadi tidak 1,37, tapi nol. Karena, sudah.

KETUA RAPAT:

Iya, karena berimbang, oke.



Ini pilihannya kalau *nggak* nambah kolom, tapi kalau nambah kolom itu akan kelihatan minus 1,379 yang kolom satunya plus 1309, kemudian menjadi sekian. Tapi *nggak* apa-apa begini aja, mungkin karena kalau dibikin kolom nanti jadi rapat kecil-kecil. Dijelaskan lebih detail di Point B, Mas, Point B angka 1 ya. Setelah angka 145 dengan narasi angka ya dan bertambah, ya dan terdapat penambahan.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Ambil dari beberapa baris setelah poin 4 saja langsung, bisa dipindahkan.

KETUA RAPAT:

Ya, cukup. *Nah* sehingga pagu anggaran udah benar nih. *Nah*, ditambah satu lagi nih yang setelah angka keempat.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Dan programnya barangkali, Bu.

KETUA RAPAT:

Ya?

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Dan programnya barangkali Ibu, terdapat penambahan sebesar 1,3 triliun lagi pada program pendidikan.

KETUA RAPAT:

Nah, itu nanti kan ini kan hanya bunyi Rupiah, Bu. Programnya itu disetujui di setelah angka 4, angka ke-5. Jadi, bukan kata dengan demikian nih. *Nah*, ini yang kelima ini angka 5 ya, angka 5. Coba beda, taruh di setelah rupiah terus di *enter* nantikan angka 5 tuh.

Ini angka 5, total anggaran dari pengurangan keempat unit utama tersebut sebesar 1 koma sekian dialihkan untuk membiayai. *Nah*, udah cocok ya Bu. Jadi, satu poin sendiri ya.

Cukup ya. Oke, ada lagi Bu?

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Angka tadi yang di 145 2580.



KETUA RAPAT:

145.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

580, bukan 850.

KETUA RAPAT:

Hmm, 145 20580. Kelirunya di mana Bu?

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Udah tadi Bu.

KETUA RAPAT:

Kamu keliru nih, 850. Keliru angka 85, 8 ke 5, 5 ke 8. Ini ya ininya kita tengahnya, ngantuk capek.

Oke, ada lagi Bu? Cukup ya.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Mohon tetap barangkali, Bu. Karena, di situ nomor 1 itu program pendidikan tinggi disebut mendapatkan, terdapat pengurangan. Maka, yang tambahan 1,379 itu mohon bisa disebut itu untuk program pendidikan PAUD.

KETUA RAPAT:

Sudah itu Nomor 5.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Karena nanti kesannya, pendidikan tinggi berkurang terus tambahannya belum tahu ke mana, yang nomor 1 Bu. Setelah angka 1379 itu, sehingga pagu dalam program, untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun.

KETUA RAPAT:

Nah, kita kan menyetujui dulu pengurangannya, baru dari seluruh alokasi itu ditujukan ke Nomor 5. Ini kan pengurangan di unit pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian ini mau ke mana, itu di poin 5.



SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Iya, Bu. Hanya karena memang di situ disebutkan angka 35 triliunnya di situ, jadi mau tidak mau tambahannya perlu dimasukkan. Itu sudah aman kalau seperti itu.

KETUA RAPAT:

Itu poin sendiri, Ibu. Jadi, ini hanya bicara angka. Nomor 1 bicara angka, nomor 2 bicara angka di masing-masing unit utama, kemudian ke manakah itu, ada di poin kelima tadi.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Iya, Bu.

KETUA RAPAT:

Program PAUD ya, coba 5, Mas. Nomor 5, Mas.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Iya, Bu dan tanpa menyebut program untuk ke program Indonesia pintarnya, hanya program.

KETUA RAPAT:

Kita juga tidak menyebutkan bahwa yang berkurang itu program apa, tidak.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Ada, Bu. Jadi, program pendidikan tinggi di Sekretariat Jenderal berkurang sekitar. Jadi, program besar bukan program kegiatan Bu, nama program.

KETUA RAPAT:

Nama program besarnya.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Sudah aman seperti itu.



KETUA RAPAT:

Oke, oke oke.

Terdapat penambahan untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Disamakan nih, Mas. Nama programnya dulu baru duitnya. Terdapat penambahan program ya, penambahan untuk program PAUD dan sebesar.

Oke, cukup ya Bu. Ada lagi?

Saya perpanjang 5 menit, ya. Sudah kan, Bu? Ya, 10 menit ya.

(RAPAT : SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

(RAPAT DIPERPANJANG 10 MENIT)

Baik, cukup? Paling lambat mau kapan, Ibu? Kira-kira sebelum kita reses.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Dua minggu.

KETUA RAPAT:

Dua minggu dari sekarang itu adalah, kapan ya Pak Fikri? Mas Putra kapan ya? Ini dari pada ngantuk toh.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Tanggal 28 Juni, Bu.

KETUA RAPAT:

Dua minggu dari sekarang.

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI:

Tanggal 28 Juni, Bu.

KETUA RAPAT:

Tanggal 28 Juni berarti kita ada di. Kita nawar tanggal 25, Bu. Eh, tanggal 23, tanggal 23 ya Bu.



Baik, yang F. Komisi X dan Kemendikbudristek RI melakukan penandatanganan Pagu APBN tahun 2023 berdasarkan pergeseran sebagaimana keputusan huruf A, huruf B, dan huruf C, huruf D, dan huruf E.

Cukup ya semua ini? Jadi nanti setelah ini kita tanda tangan ya, Pak Menteri. Cukup? Oke.

Yang terakhir ngomong apa lagi ya, yang dibaca. Udah ya? Masih.

Laporan pergeseran ini dapat disetujui, Bu?

(RAPAT : SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Baik, terima kasih.

Dengan selesainya persetujuan ini, kami berikan waktu kepada Kemendikbud untuk menyampaikan *closing statement*.

Silakan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI :

Terima kasih untuk kesepakatan hari ini, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X.

Demikian dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dengan selesainya kata akhir dari Kemendikbud. Maka, selesai pula acara Rapat Kerja pada hari ini.

Bahwa kita telah menetapkan sebuah program yang luar biasa, yaitu mengalihkan berbagai macam program dari Kemendikbud, dari berbagai macam unit utama ke beasiswa mahasiswa, eh beasiswa siswa SD kurang mampu.

Ini merupakan sebuah keputusan yang luar biasa dan melalui jalan panjang yang sangat berliku. Mudah-mudahan di setiap kita melakukan Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek RI kita akan selalu mengingat bahwa tugas kita sebagai Anggota DPR adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal berapa, Pak Dede? Pak Dede ngantuk.

Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Terima kasih kepada Bu Ledia.



Saya tutup rapat pada malam hari ini. Dengan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota dan kepada Pak Menteri, Mas Menteri beserta seluruh jajaran.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(KETUK PALU 3 KALI)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 20.45 WIB)

a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

TTD

DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003

